



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIDHARTA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **152841**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.795.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 1150 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/324 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
5. Tanah Seluas 4236 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 883 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **631.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MT 25 Tahun 2024, WARISAN Rp. 56.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **59.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	301.927.155
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.786.927.155
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.786.927.155

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.